

“MODEL ANAK ANGKAT” DALAM PENINGKATAN KUALITAS SEKOLAH (KASUS SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR, YOGYAKARTA)

Tatang M. Amirin, Suyud M.D., dan Nurlina Marliyasari Asih
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Several models has been developed in Indonesia in improving the school quality. One of them is a model of developing one school as a core-school (“sekolah inti”), from which the other surrounding (a cluster) schools (named impacted-school or “sekolah-imbas) are expected to get its impact (“imbas”) through “sekolah inti dan imbas” cooperation, in which the core-school became a development center for a cluster of schools. The core-school is a selected school which has higher quality resources, especially in human resources, than the other surrounding schools. This school staffs, after experienced a special training, has been given responsibility to pull up the other school staffs in improving school quality. A “sekolah inti-imbas model” like has been developed in Muhammadiyah schools, a private schools which is belong to Muhammadiyah organization, in Yogyakarta. This model firstly developed by Muhammadiyah Primary School at Sapen, Yogyakarta. Several Muhammadiyah primary schools then affiliated with and took the name of this school as a “benchmark” for public reputation and trust. One of them is Muhammadiyah Primary School at Condongcatuur which is named as “Muhammadiyah Sapen Primary School at Condongcatuur.” Nowaday, this school, after releasing from Sapen “subordination,” become a “father figure” school, bringing the other lower level quality and near collapsed Muhammadiyah schools, even a junior high school, to be sustained and higher quality schools. In other words, several Muhammadiyah schools in Yogyakarta have developed a “fosterparenting” model to “move up together” to be the best schools.

Keywords: Muhammadiyah schools, “model anak angkat” (fosterparenting model), school quality improvement.

PENDAHULUAN

Departemen (Kementerian) Pendidikan Republik Indonesia telah banyak membuat proyek peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, ada yang berupa pengembangan model baru sistem persekolahan, ada yang berupa pengembangan kualitas sekolah (pendidikan) secara menyeluruh atau komprehensif, ada pula yang berupa pengembangan model kurikulum, model manajemen (pengelolaan) sekolah, dan peningkatan kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan).

Pengembangan model sistem persekolahan misalnya Proyek Pengembangan Sekolah Pembangunan dengan menggunakan sistem modul dalam kegiatan pendidikannya, pengembangan sekolah terbuka (SD Terbuka, SMP Terbuka) yang member kesempatan anak-anak daerah terpencil bersekolah formal di daerahnya, tidak di sekolah (sekolah induk), pengembangan kelas akselerasi yang memberi kesempatan anak-anak cerdas untuk mendapatkan masa pendidikan lebih pendek dibandingkan yang biasa-biasa saja, dan

pengembangan pendidikan sistem inklusif yang memberikan kesempatan kepada anak-anak luar biasa (berkebutuhan khusus) untuk bersekolah bersama-sama dengan anak-anak normal.

Pengembangan kualitas sekolah (pendidikan) misalnya melalui pengembangan sekolah model, yaitu dengan mengembangkan satu sekolah sebagai sekolah percontohan dengan diberikan berbagai fasilitas yang memadai untuk dicontoh oleh sekolah-sekolah di sekitarnya, pengembangan gugus sekolah inti dan sekolah imbas (antara lain melalui Primary Education Quality Improvement Project atau PEQIP, yaitu peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar). Ini akan dipaparkan lebih luas di bawah.

Pengembangan model kurikulum antara lain berupa perubahan kurikulum dari berbasis ilmu menjadi berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum (materi pelajaran) disusun berdasarkan kompetensi (kemampuan, kecakapan keahlian) yang hendak dicapai (diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik). Pendekatan ini lazimnya digunakan di lembaga pendidikan kejuruan, tetapi kemudian diberlakukan ke seluruh jajaran pendidikan dari SD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk sekolah-sekolah yang termasuk kategori “sekolah menengah umum” yang sebenarnya lebih banyak berbasis ilmu. Model KBK ini, seiring dengan semangat desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, “dimodifikasi” (sebetulnya hanya manajemennya) menjadi pengembangan kurikulum di tingkat satuan (unit organisasi) pendidikan atau KTSP. Dengan kata lain, dari pengembangan kurikulum sentralistik di tingkat pusat organisasi pendidikan (Depdiknas/Kemendiknas) menjadi pengembangan kurikulum desentralistik di tingkat sekolah.

Pengembangan pendidikan lewat jalur manajemen (pengelolaan) antara lain dengan dikembangkannya model manajemen berbasis sekolah. (MBS), yang karena dikaitkan dengan peningkatan mutu sekolah sering disebut pula dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Dengan kata lain, model manajemen (pengelolaan) pendidikan yang sentralistik (semuanya serba diatur di tingkat pusat dan dinas), diubah menjadi desentralistik, dikelola di tingkat sekolah. Model manajemen yang akan dikembangkan tetapi kemudian dibatalkan secara yuridis adalah menjadikan setiap unit (satuan) penyelenggara pendidikan sebagai badan hukum pendidikan (BHP).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, antara lain dilakukan dengan mengembangkan kelompok kerja guru (KKG) sebagai ajang para guru berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan tugas kependidikannya. Untuk pengembangan kemampuan dan pengelolaan sekolah dikembangkan pula KKKS (kelompok kerja kepala sekolah) dan KKPS (kelompok kerja pengawas sekolah). Secara yuridis, lewat Undang-Undang Guru dan Dosen, dewasa ini dikembangkan pula aturan persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru yang mempersyaratkan kualifikasi (persyaratan, ketentuan minimal jenjang) akademik dan kompetensi tertentu bagi guru, termasuk sertifikasi profesi yang dikembangkan melalui pendidikan profesi guru (PPG).

Berbagai upaya tersebut, di samping ada sisi kekuatan dan sisi kelemahan konseptual, secara faktual ada yang berhasil ada pula yang tidak menunjukkan bekas sama sekali. Tentu sebagian, terutama yang dewasa ini masih dilakukan, masih harus dievaluasi keberhasilannya, bahkan kemungkinan ditiadakan atau diubah.

MODEL SEKOLAH INTI - SEKOLAH IMBAS

Pengembangan model peningkatan mutu sekolah dengan mengadakan sekolah inti dan sekolah imbas pada dasarnya mendasarkan diri pada kenyataan keberagaman sekolah dari berbagai segi, terutama SDM dan fasilitas. Dalam model ini salah satu sekolah di dalam satu lingkungan (*gugus, cluster*) ditingkatkan mutunya lewat berbagai fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penyediaan fasilitas yang lebih. Sekolah ini, yang disebut dengan **sekolah inti**, diharapkan akan memberikan imbasan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya terdekat (sekolah imbas). Imbasan dimaksud berupa peningkatan kompetensi guru yang diharapkan akan meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan. Sekolah imbas “diajari” untuk meningkatkan kompetensi gurunya, dan sekaligus “belajar” ke sekolah inti bagaimana meningkatkan pengelolaan sekolah.

Aktivitas pengimbasan diselenggarakan dalam beragam bentuk, dari bersama-sama ikut mendapatkan pendidikan dan pelatihan, melakukan “kunjungan sekolah dan kelas (*school and classroom visitation*) serta amatan kelas (*classroom observation*), sampai dengan duduk bersama mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi dan bagaimana upaya memecahkannya.

Sekolah model pada dasarnya berbasis prinsip yang sama. Satu sekolah di daerah atau wilayah tertentu dikembangkan dengan disuntik berbagai fasilitas dan pendidikan (diklat). Sekolah ini diharapkan nantinya akan memberikan imbasan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Sekolah-sekolah sekitar diharapkan mencontoh sekolah model. Kelemahan konseptual mendasar dari pengembangan sekolah model adalah sekolah model itu merupakan sekolah yang “elit” yang serba berkecukupan (karena mendapatkan pasokan lebih). Oleh karenanya tidak mungkin bisa ditiru oleh sekolah-sekolah “di bawah garis kemiskinan” fasilitas dan SDM. Ini akan berbeda jika yang dikembangkan justru sekolah miskin yang dalam kemiskinannya bisa berkualitas. Sekolah miskin lain pasti akan bias meniru. Model seperti ini yang sampai saat ini belum terinovasikan, “*membuat anak miskin dan tidak terlampaui cerdas tetap bisa berhasil belajar.*”

Model “imbas-mengimbas” yang mirip-mirip teknik supervisi pendidikan “*school and classroom visitation and observation*” dikembangkan lewat apa yang sedang populer sekarang disebut dengan “**lesson-study**.” Guru-guru dari sekolah-sekolah tertentu berkunjung berkumpul di sesuatu sekolah melakukan observasi kelas (KBM di kelas) untuk kemudian melakukan diskusi tukar pengalaman dan pengetahuan. Dengan cara ini diharapkan satu sama lain dapat saling belajar, dan meningkatkan kompetensi mendidiknya.

Supervisi pendidikan menggunakan teknik *classroom-observation* selama ini tidak bisa berjalan, dan sulit dijalankan, terutama di sekolah dasar yang jumlah gurunya terbatas, bahkan kerap kali kurang, karena untuk melakukannya guru harus meninggalkan kelasnya.

Model sekolah inti-sekolah imbas itu, jika sekolah inti dikembangkan seperti sekolah model, juga akan menemui kegagalan, karena sekolah imbas dengan berbagai keterbatasannya tidak bisa meniru sekolah inti. Berbagai fasilitas yang lebih dari memadai yang dipunyai sekolah inti hasil dari pasokan pemerintah, tidak mudah ditiru oleh sekolah imbas. Kegiatan “*classroom-observation*” juga, seperti disebutkan, akan menemui banyak kendala. Imbas-mengimbas dengan model KKG dan KKS pun tidak mudah untuk berjalan. Aktivitas KKG dan KKS sangat terbatas, karena para guru di luar jam tugasnya masih harus

melakukan banyak kegiatan untuk kehidupannya. Masih ditunggu dampak dari adanya tambahan tunjangan profesi bagi para guru.

Hadi dan Wiratmaja (t.th) antara lain menyimpulkan sebagai berikut.

Each gugus sekolah has one “sekolah inti” (key-school) as a centre and several “sekolah imbas” (impacted-schools). Gugus sekolah has a learning resource centre which is located at key-school. Each schools cluster has a KKG as a mode of teacher professional development and a K3S as a medium for principal professional development.

The result of the research shows that although teachers appreciate KKG as a meant to improve their competency in teaching mathematics, but they still question about the effectiveness of this activity due to (1) limited budget they get from the government to sustain the meeting and for procurement of teaching aids, and (2) lack of examples of good models of innovative teaching that resulted in the use of lecturing as the method of mathematics teaching

MODEL ANAK ANGKAT SD MUHAMMADIYAH

Berbeda dari model sekolah inti dan sekolah imbas seperti telah dibicarakan di muka, di kalangan pendidikan (sekolah) Muhammadiyah di Yogyakarta ada semacam (menurut istilah Penulis) sistem anak angkat atau anak asuh untuk meningkatkan keberlangsungan dan mutu sekolah di lingkungan Muhammadiyah.

Pada mulanya sistem ini berupa kelas jauh yang dikembangkan oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen. SD Muhammadiyah Sapen dikenal luas di kalangan warga masyarakat sebagai sekolah yang baik, sehingga menjadi sekolah favorit para orang tua, khususnya yang beragama Islam. Minat orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke SD Muhammadiyah Sapen luar biasa. Peminat jauh melebihi daya tampung sekolah, kendati uang sekolah yang harus dibayar orang tua relatif tinggi. Oleh karenanya sekolah ini juga menjadi sekolah elite.

Dengan mengingat calon murid sangat banyak, tidak cuma dari warga sekitar sekolah, sementara daya tampung terbatas, maka dikembangkanlah kelas jauh dan atau “sekolah filial” (menginduk) ke SD Muhammadiyah Sapen. Salah satu kelas jauh yang didirikan adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen di Condongcatur, Sleman, yang didirikan tahun 1990. Sebagai kelas jauh SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Condongcatur (SD Muhammadiyah Sapen di Condongcatur) ini sepenuhnya dikelola oleh induknya yang berada di Sapen, Yogyakarta. Di sekolah ini tidak ada kepala sekolah, yang ada hanya guru koordinator sebagai wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sapen.

Terhitung tahun 1998 SD Muhammadiyah Sapen di Condongcatur melepaskan diri dari induknya, dan berdiri sendiri sebagai SD Muhammadiyah Condongcatur. Karena sudah mandiri, maka segala fasilitas SD Muhammadiyah Sapen yang semula ada di sekolah ini ditarik kembali oleh SD Muhammadiyah Sapen. Pada awalnya SD ini sempat mengalami kondisi pasang surut penerimaan murid. Itu karena sudah tidak menyandang nama SD Muhammadiyah Sapen lagi, sehingga sebagian warga masyarakat ragu. Akan tetapi setelah berjalan dua tiga tahun, akhirnya SD Muhammadiyah Condongcatur mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi, sehingga dapat menerima murid minimal empat kelas paralel.

Tradisi kelas jauh ini kemudian dilanjutkan oleh SD Muhammadiyah Condongcatur dengan modifikasi, yaitu benar-benar membuat cabang atau kelas jauh dan menjadikan sekolah yang sudah ada sebagai anak angkat atau anak asuh. Yang termasuk kelas jauh adalah SD Muhammadiyah Pakem (SD Muhammadiyah Condongcatur di Pakem), tahun 2003, dan SD Muhammadiyah Prambanan (SD Muhammadiyah Condongcatur di Prambanan), tahun 2005. Sekolah yang dijadikan anak angkat adalah SD Muhammadiyah Kadisoka, Kalasan (berdiri tahun 2001, dijadikan anak angkat tahun 2003), dan SMP Muhammadiyah Depok 2 (berdiri 1970, dijadikan anak angkat 2007).

Pembukaan kelas jauh pada dasarnya dilandasi keinginan Pimpinan Muhammadiyah setempat untuk mendirikan sekolah, tetapi dengan meminjam (“mendompleng”) pamor SD Muhammadiyah Condongcatur yang sudah mulai menjadi sekolah favorit, yang banyak diminati orang tua murid, sehingga jumlah pendaftar jauh melebihi daya tampungnya. Diharapkan dengan membawa nama besar SD Muhammadiyah Condongcatur itu maka sekolah yang baru akan didirikan itu pun akan ikut terimbas menjadi sekolah favorit juga. Nama besar itu antara lain dengan pencantuman nama “bapak angkatnya” (SD Muhammadiyah Condongcatur), walaupun karena aturan administrasi, secara resmi nama itu tidak dicantumkan. Jadi, tidak ada nama resmi SD Muhammadiyah Condongcatur di Kadisoka, melainkan bernama SD Muhammadiyah Kadisoka. Kepada masyarakat umum penyebutan kelas jauh itu tetap dipublikasikan.

Pengangkatan sekolah yang sudah ada (SD Muhammadiyah Kadisoka dan SMP Muhammadiyah Depok 2) sebagai anak angkat (anak asuh) pada dasarnya sebagai upaya menolong sekolah yang ada itu dari kebangkrutan (*kolaps*). Sekolah tersebut berada dalam kondisi serba “di bawah garis kemiskinan,” yaitu miskin sumber daya dan siswa. Lewat koordinasi dan pembinaan, diharapkan sekolah tersebut menjadi terangkat kembali dan bisa hidup dengan baik.

SMP Muhammadiyah Depok 2 Sleman dipilih untuk dijadikan anak angkat, selain karena kondisinya yang memprihatinkan, juga dilandasi keinginan para orang tua murid SD Muhammadiyah Condongcatur untuk mendapatkan sekolah lanjutan yang bermutu bagi anak-anaknya. Sekolah ini pernah bergabung selama setahun di SD Muhammadiyah Condongcatur untuk antara lain agar para orang tua murid SD akrab dengan SMP Muhammadiyah Depok 2, sekaligus agar mulai tertarik memasukkan anak-anaknya ke SMP Muhammadiyah Depok 2. Dampaknya, tahun berikutnya SMP Muhammadiyah Depok 2 telah bisa kembali ke gedung asalnya dengan mendapatkan murid yang relatif memadai.

Koordinasi dan pembinaan sekolah-sekolah dalam SD Muhammadiyah Condongcatur Group itu dilakukan lewat pengaturan bersama:

1. Penerimaan calon murid dan pembinaannya. Rekrutmen calon murid, walau dilakukan di masing-masing sekolah, menggunakan kriteria dan cara (prosedur) yang seragam. Demikian pula dengan pembinaannya yang menggunakan tata tertib sekolah yang seragam.
2. Penerimaan (rekrutmen) tenaga guru dan tenaga administrasi. Penerimaan tenaga guru dan staf administrasi dilakukan sepenuhnya di sekolah induk (SD Muhammadiyah Condongcatur) dengan kriteria dan prosedur yang sama. Pembinaan dilakukan dalam koordinasi SD Muhammadiyah Condongcatur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sementara keseharian tetap dilakukan oleh masing-masing sekolah.

3. Pengelolaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah SD Muhammadiyah Condongcatur Group dibakukan bersama, terutama berkaitan dengan “muatan institusional” yang berbeda dari kurikulum Depdiknas.
4. Penerimaan dan alokasi dana. Seluruh administrasi keuangan terpusat dikelola SD Muhammadiyah Condongcatur, walaupun masing-masing sekolah, sesuai dengan standar sekolah mandiri, membuat RAPBS (rancangan anggaran penerimaan dan belanja sekolah). Distribusi dan alokasi anggaran menggunakan prinsip subsidi silang jika diperlukan. Oleh karenanya tidak ada sekolah yang kekurangan anggaran minimal yang diperlukan.
5. Pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana juga dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang disepakati dan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing sekolah. Semuanya dilakukan dalam koordinasi SD Muhammadiyah Condongcatur.
6. Penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan ketatausahaan. Kegiatan ketatausahaan dilakukan secara terkoordinasi, walaupun masing-masing sekolah menyelenggarakan urusan ketatausahaannya sendiri, terutama berkaitan dengan Dinas Pendidikan setempat.
7. Penyelenggaraan kegiatan humas internal dan eksternal. Khususnya yang berkaitan dengan publikasi eksternal, sebagian besar diselenggarakan lewat SD Muhammadiyah Condongcatur. Ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas promosi sekolah.
8. Koordinasi organisasi dan manajemen. Secara rutin antara SD Muhammadiyah Condongcatur dan “anak angkatnya” dilakukan rapat koordinasi bulanan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi semua anggota “group” dan memikirkan upaya pengembangan bersama.

Dampak dari model bapak angkat – anak angkat ini tampak terutama dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mutu sekolah. Dari tahun ke tahun peningkatan jumlah calon murid yang mendaftar terus meningkat, sehingga jumlah murid yang diterima di setiap sekolah pun menjadi sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu, berbagai prestasi siswa pun mulai bisa diraih dengan baik oleh setiap sekolah, sementara kualitas SDM pun bisa ditingkatkan dengan baik, dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di setiap sekolah pun menjadi relatif memadai.

SUMBER:

Nurlina Marliyari Asih. 2010. “Jalinan hubungan pengelolaan Sekolah Dasar Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta dengan mantan induknya dan cabang-cabangnya.” Skripsi Sarjana, di bawah bimbingan Tatang M. Amirin dan Suyud M.D.

RUJUKAN:

Hadi, Sutarto, and Wiratmaja, I Gt.Ng. (year unidentified). “Teachers professional development through school cluster meeting.” Research article, online.

Mirfani, Aceng Muhtarom. (t.th). “Masalah Inovasi Sekolah Pembangunan di Indonesia.” (artikel online)

Trimo. 2007. “Studi Kasus Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru.” **Pendidikan Network** (online).

o000o